



WALI KOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 100.3.3.3- **306** -2023

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN DAN PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA
ANGGARAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN 2024

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, agar lebih efektif dan efisiennya pelaksanaan program dan kegiatan serta penatausahaan keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah, perlu menetapkan Pengguna Anggaran dan menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Pengguna Anggaran dan Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);
 13. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
 14. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

4

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 98);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pengguna Anggaran dan Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2024 dengan nama dan jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat/pegawai sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU harus bertanggung jawab menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- KETIGA : Kepala Organisasi Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran mempunyai tugas :
- a. menyusun Rencana Kerja Anggaran-Organisasi Perangkat Daerah;
 - b. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Organisasi Perangkat Daerah;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
 - d. melaksanakan anggaran Organisasi Perangkat Daerah yang dipimpinnya;

4

- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
- i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab Organisasi Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
- j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
- k. mengawasi pelaksanaan anggaran Organisasi Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
- l. menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah;
- m. menetapkan pejabat lainnya dalam Organisasi Perangkat Daerah yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
- n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT

- : Melaksanakan tugas lainnya sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KETIGA huruf n adalah :
- a. menyusun anggaran kas Organisasi Perangkat Daerah;
 - b. melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah;
 - c. menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 - d. menyusun dokumen Pemberian Bantuan Sosial;
 - e. menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. menyusun dan menyampaikan laporan Organisasi



Perangkat Daerah yang dipimpinnya kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

KELIMA : Pengguna Anggaran dalam pelaksanaan tugasnya mempunyai wewenang :

- a. menandatangani dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menandatangani dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
- c. menandatangani dokumen Pemberian Bantuan Sosial;
- d. menetapkan pejabat lainnya dalam Organisasi Perangkat Daerah yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
- e. menetapkan Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu.

KEENAM : Pengguna Anggaran dapat melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Unit Kerja pada Organisasi Perangkat Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan/sub kegiatan, lokasi dan/atau rentang kendali.

KETUJUH : Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEENAM meliputi :

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- b. melaksanakan anggaran unit Organisasi Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
- c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;

4

- f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya;
- g. melaksanakan tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- h. dalam melaksanakan tugas Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran.

KEDELAPAN : Tugas dan wewenang Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KETIGA sampai DIKTUM KETUJUH juga merupakan tugas dan wewenang Kuasa Pengguna Anggaran Unit Kerja Organisasi Perangkat Daerah khusus (Badan Layanan Umum Daerah).

KESEMBILAN : Jika Kuasa Pengguna Anggaran berhalangan maka fungsinya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran langsung kembali kepada Pengguna Anggaran.

KESEPULUH : Dalam hal adanya perubahan personil pejabat karena mutasi dan atau hal lainnya, maka hak dan kewajiban pejabat yang baru terhitung sejak serah terima jabatan dilaksanakan.

KESEBELAS : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

KEDUA BELAS : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 4 Desember 2023

Pj. WALI KOTA SAWAHLUNTO,

ttd

ZEFNIHAN

04 DEC 2023
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

INDRA MULYONO, SH, MH
NIP. 19320411 201001 1 014

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Daerah Kota Sawahlunto;
2. Kepala Cabang Bank Nagari (BPN) Sumbang Cabang Sawahlunto;
3. Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 100.3.3.3- **306** -2023
TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN DAN PENUNJUKAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024

NO.	OPD	JABATAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN	JABATAN	TMT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	SEKRETARIAT DAERAH	Pengguna Anggaran	SEKRETARIS DAERAH	2 Januari 2024	Menandatangani SPM LS dan bukti pembayaran gaji ASN, KDH dan WKDH dan Menandatangani SPM UP/OU, bukti-bukti pembayaran dan dokumen pengesahan pertanggungjawaban pendapatan dan belanja program/kegiatan pada Sekretariat Daerah
		Kuasa Pengguna Anggaran	Kepala Bagian Pemerintahan	2 Januari 2024	Menandatangani SPM TU/LS, bukti-bukti pembayaran pada program/kegiatan 1. Administrasi tata pemerintahan 2. Fasilitas kerjasama daerah
		Kuasa Pengguna Anggaran	Kepala Bagian Hukum	2 Januari 2024	Menandatangani SPM TU/LS, bukti-bukti pembayaran pada program/kegiatan Fasilitasi dan koordinasi hukum
		Kuasa Pengguna Anggaran	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	2 Januari 2024	Menandatangani SPM TU/LS, bukti-bukti pembayaran pada program/kegiatan Pelaksanaan protokol dan Komunikasi Pimpinan
		Kuasa Pengguna Anggaran	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	2 Januari 2024	Menandatangani SPM TU/LS, bukti-bukti pembayaran pada program/kegiatan Pengelolaan pengadaan barang dan jasa
		Kuasa Pengguna Anggaran	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	2 Januari 2024	Menandatangani SPM TU/LS, bukti-bukti pembayaran pada program/kegiatan Pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat
		Kuasa Pengguna Anggaran	Kepala Bagian Perencanaan dan Sumber Daya Alam	2 Januari 2024	Menandatangani SPM TU/LS, bukti-bukti pembayaran pada program/kegiatan 1. Pelaksanaan kebijakan perencanaan 2. Pemantauan kebijakan Sumber Daya Alam
		Kuasa Pengguna Anggaran	Kepala Bagian Umum	2 Januari 2024	Menandatangani SPM TU/LS, bukti-bukti pembayaran pada program/kegiatan Bagian Umum 1. Administrasi keuangan perangkat daerah 2. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah 3. Administrasi kepegawaian perangkat daerah 4. Administrasi umum perangkat daerah 5. Administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil daerah 6. Penyediaan jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah 7. Pemeliharaan barang milik daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah 8. Fasilitas kerumahaan Sekretariat Daerah 9. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
		Kuasa Pengguna Anggaran	Kepala Bagian Organisasi	2 Januari 2024	Menandatangani SPM TU/LS, bukti-bukti pembayaran pada program/kegiatan Penataan Organisasi
Kuasa Pengguna Anggaran	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	2 Januari 2024	Menandatangani SPM TU/LS dan bukti-bukti pembayaran pada program/kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		
2	SEKRETARIAT DPRD	Pengguna Anggaran	SEKRETARIS DPRD	2 Januari 2024	Menandatangani SPM UP/OU, bukti-bukti pembayaran dan dokumen pengesahan pertanggungjawaban pendapatan dan belanja program/kegiatan Sekretariat DPRD Menandatangani SPM TU/LS, bukti-bukti pembayaran pada program : 1. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
		Kuasa Pengguna Anggaran	Kabag Umum dan Keuangan	2 Januari 2024	Menandatangani SPM TU/LS dan bukti-bukti pembayaran pada : Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kegiatan : Fasilitasi Tugas DPRD

4

NO.	OPD	JABATAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN	JABATAN	TMT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
3	INSPEKTORAT KOTA	Pengguna Anggaran	INSPEKTUR KOTA SAWAHLUNTO	2 Januari 2024	Menandatangani SPM UP/GU/TU/LS, bukti-bukti pembayaran dan dokumen pengesahan pertanggungjawaban pendapatan dan belanja program/kegiatan pada Inspektorat Kota Sawahlunto
4	DINAS PENDIDIKAN	Pengguna Anggaran	KEPALA DINAS PENDIDIKAN	2 Januari 2024	Menandatangani SPM UP/GU, bukti-bukti pembayaran dan dokumen pengesahan pertanggungjawaban pendapatan dan belanja program/kegiatan pada Dinas Pendidikan Menandatangani SPM LS/TU dan bukti pembayaran pada : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan : Administrasi keuangan perangkat daerah
		Kuasa Pengguna Anggaran	Sekretaris Dinas Pendidikan	2 Januari 2024	Menandatangani SPM TU/LS dan bukti-bukti pembayaran pada : I Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan : 1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi kepegawaian perangkat daerah 3. Administrasi umum perangkat daerah 4. Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah 5. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah 6. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah II Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kegiatan : Pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan
		Kuasa Pengguna Anggaran	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	2 Januari 2024	Menandatangani SPM TU/LS dan bukti-bukti pembayaran pada : I Program Pengelolaan Pendidikan Kegiatan : 1. Pengelolaan pendidikan Sekolah Dasar 2. Pengelolaan pendidikan Sekolah Menengah Pertama II Program Pengembangan Kurikulum Kegiatan : Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
Kuasa Pengguna Anggaran	Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal	2 Januari 2024	Menandatangani SPM TU/LS dan bukti-bukti pembayaran pada : Program Pengelolaan Pendidikan Kegiatan : 1. Pengelolaan pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 2. Pengelolaan pendidikan Nonformal/ Kesetaraan		
5	DINAS KEBUDAYAAN	Pengguna Anggaran	KEPALA DINAS KEBUDAYAAN	2 Januari 2024	Menandatangani SPM UP/GU/TU/LS, bukti-bukti pembayaran dan dokumen pengesahan pertanggungjawaban pendapatan dan belanja program/kegiatan pada Dinas Kebudayaan
6	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLARAGA	Pengguna Anggaran	KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLARAGA	2 Januari 2024	Menandatangani SPM UP/GU, bukti-bukti pembayaran dan dokumen pengesahan pertanggungjawaban pendapatan dan belanja program/kegiatan pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Menandatangani SPM TU/LS dan bukti-bukti pembayaran pada program : 1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan 3. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kelahragan

8

NO.	OPD	JABATAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN	JABATAN	TMT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
		Kuasa Pengguna Anggaran	Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata	2 Januari 2024	<p>4. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan</p> <p>5. Program Pemasaran Pariwisata</p> <p>6. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemabataan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual</p> <p>7. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</p> <p>Menandatangani SPM TU/LS dan bukti-bukti pembayaran pada :</p> <p>Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata</p> <p>Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kab/Kota 2. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota 3. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/Kota 4. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kab/Kota
7	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Pengguna Anggaran	KEPALA DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2 Januari 2024	<p>Menandatangani SPM UP/GU, bukti-bukti pembayaran dan dokumen pengesahan pertanggungjawaban pendapatan dan belanja program/kegiatan pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</p> <p>Menandatangani SPM TU/LS dan bukti-bukti pembayaran pada program :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 3. Program Sediaan Farmasi Alat Kesehatan dan Makanan Minuman 4. Program Pengendalian Penduduk 5. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) 6. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) 7. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Kuasa Pengguna Anggaran	Kepala Bidang Pelayanan, Promosi dan Sumber Daya Kesehatan	2 Januari 2024	<p>Menandatangani SPM TU/LS dan bukti-bukti pembayaran pada :</p> <ol style="list-style-type: none"> I Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat <p>Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kawasan Daerah Kab/Kota 2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tk Daerah Kab/Kota 3. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tk Daerah Kab/Kota <ol style="list-style-type: none"> II Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan <p>Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kab/Kota 2. Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan Sumber Daya SDM kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 3. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Kesehatan Tk Daerah Kab/Kota <ol style="list-style-type: none"> III Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman <p>Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 2. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

NO.	OPD	JABATAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN	JABATAN	TMT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
					<p>3. Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan</p> <p>4. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga</p> <p>IV Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tk Daerah Kab/Kota 2. Pelaksanaan sehat dalam rangka Promotif Preventif Tk Daerah Kab/Kota 3. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	UPTD Instalasi Farmasi Kota	Kuasa Pengguna Anggaran	Kepala UPTD Instalasi Farmasi Kota	2 Januari 2024	<p>Menandatangani SPM TU/LS dan bukti-bukti pembayaran pada :</p> <p>I Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan Masyarakat Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (Instalasi) 2. Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah
	UPTD Puskesmas Talawi	Kuasa Pengguna Anggaran	Kepala UPTD Puskesmas Talawi	2 Januari 2024	<p>Menandatangani SPM TU/LS dan bukti-bukti pembayaran pada :</p> <p>I Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota Kegiatan : Peningkatan Pelayanan BLUD</p> <p>II Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tk Daerah Kab/Kota 2. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi <p>III Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Kegiatan :</p> <p>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p>
	UPTD Puskesmas Kolok	Kuasa Pengguna Anggaran	Kepala UPTD Puskesmas Kolok	2 Januari 2024	<p>Menandatangani SPM TU/LS dan bukti-bukti pembayaran pada :</p> <p>I Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota Kegiatan : Peningkatan Pelayanan BLUD</p> <p>II Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tk Daerah Kab/Kota 2. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi <p>III Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Kegiatan :</p> <p>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p>
	UPTD Puskesmas Sei Durian	Kuasa Pengguna Anggaran	Kepala UPTD Puskesmas Sei Durian	2 Januari 2024	<p>Menandatangani SPM TU/LS dan bukti-bukti pembayaran pada :</p> <p>I Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota Kegiatan : Peningkatan Pelayanan BLUD</p>

NO.	OPD	JABATAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN	JABATAN	TMT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
					<p>ii Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Kegiatan : 1. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tk Daerah Kab/Kota 2. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi</p> <p>iii Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Kegiatan : Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKDM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p>
	UPTD Puskesmas Lumo	Kuasa Pengguna Anggaran	Kepala UPTD Puskesmas Lumo	2 Januari 2024	<p>Menandatangani SPM TU/LS dan bukti-bukti pembayaran pada :</p> <p>i Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota Kegiatan : Peningkatan Pelayanan BLUD</p> <p>ii Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Kegiatan : 1. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tk Daerah Kab/Kota 2. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi</p> <p>iii Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Kegiatan : Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKDM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p>
	UPTD Puskesmas Silungkang	Kuasa Pengguna Anggaran	Kepala UPTD Puskesmas Silungkang	2 Januari 2024	<p>Menandatangani SPM TU/LS dan bukti-bukti pembayaran pada :</p> <p>i Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota Kegiatan : Peningkatan Pelayanan BLUD</p> <p>ii Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Kegiatan : 1. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tk Daerah Kab/Kota 2. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi</p>
	UPTD Puskesmas Kampung Teleng	Kuasa Pengguna Anggaran	Kepala UPTD Puskesmas Kampung Teleng	2 Januari 2024	<p>Menandatangani SPM TU/LS dan bukti-bukti pembayaran pada :</p> <p>i Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota Kegiatan : Peningkatan Pelayanan BLUD</p> <p>ii Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Kegiatan : 1. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tk Daerah Kab/Kota 2. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi</p> <p>iii Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Kegiatan : Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKDM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p>

NO	OPD	JABATAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN	JABATAN	TMT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
	UPTD RSUD	Kuasa Pengguna Anggaran	DIREKTUR UPTD RSUD	2 Januari 2024	Menandatangani SPM UP/GU/TU/LS, bukti-bukti pembayaran dan dokumen pengesahan pertanggungjawaban pendapatan dan belanja program/kegiatan pada RSUD Kota Sawahlunto
8	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Pengguna Anggaran	KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2 Januari 2024	Menandatangani SPM UP/GU/TU/LS, bukti-bukti pembayaran dan dokumen pengesahan pertanggungjawaban pendapatan dan belanja program/kegiatan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
9	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Pengguna Anggaran	KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	2 Januari 2024	Menandatangani SPM UP/GU/TU/LS, bukti-bukti pembayaran dan dokumen pengesahan pertanggungjawaban pendapatan dan belanja program/kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
10	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pengguna Anggaran	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2 Januari 2024	Menandatangani SPM UP/GU, bukti-bukti pembayaran dan dokumen pengesahan pertanggungjawaban pendapatan dan belanja program/kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Menandatangani SPM TU/LS dan bukti-bukti pembayaran pada program : 1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 3. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
		Kuasa Pengguna Anggaran	Kepala Bidang Bina Cipta Karya	2 Januari 2024	Menandatangani SPM TU/LS dan bukti-bukti pembayaran pada : I Program Pengelolaan dan pengembangan sistem Penyediaan Air Minum Kegiatan : Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di daerah kabupaten/kota II Program Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah Kegiatan : Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah III Program Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota IV Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya Kegiatan : Penyelenggaraan penataan bangunan di daerah kabupaten/kota V Program Penataan Bangunan Gedung Kegiatan : Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kab/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
		Kuasa Pengguna Anggaran	Kepala Bidang Bina Marga	2 Januari 2024	Program Penyelenggaraan Jalan Kegiatan : Penyelenggaraan jalan kabupaten/kota
11	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Pengguna Anggaran	KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	2 Januari 2024	Menandatangani SPM UP/GU, bukti-bukti pembayaran dan dokumen pengesahan pertanggungjawaban pendapatan dan belanja program/kegiatan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Menandatangani SPM TU/LS dan bukti-bukti pembayaran pada : 1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

NO.	OPD	JABATAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN	JABATAN	TMT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
					2. Program Pengembangan Perumahan 3. Program Kawasan Permukiman 4. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh 5. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) 6. Program Pengembangan Perumahan 7. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan 8. Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee 9. Program Penetapan Tanah Ulayat 10. Program Pengelolaan lain Membuka Tanah 11. Program Penatagunaan Tanah 12. Program Perencanaan Lingkungan Hidup 13. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 14. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap lain Lingkungan dan lain Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 15. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluh Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 16. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 17. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup 18. Program Pengelolaan Keekaragaman HAYATI (KEHATI) 19. Program Pengelolaan Perampasan
		Kuasa Pengguna Anggaran	Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	2 Januari 2024	Menandatangani SPM TU/LS dan bukti-bukti pembayaran pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Krgistan : 1. Administrasi Umum Perangkat Daerah 2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
12	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	Pengguna Anggaran	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	2 Januari 2024	Menandatangani SPM UP/GU/TU/LS, bukti-bukti pembayaran dan dokumen pengesahan pertanggungjawaban pendapatan dan belanja program/kegiatan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
13	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pengguna Anggaran	KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	2 Januari 2024	Menandatangani SPM UP/GU/TU/LS, bukti-bukti pembayaran dan dokumen pengesahan pertanggungjawaban pendapatan dan belanja program/kegiatan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Pengguna Anggaran	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2 Januari 2024	Menandatangani SPM UP/GU/TU/LS, bukti-bukti pembayaran dan dokumen pengesahan pertanggungjawaban pendapatan dan belanja program/kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15	DINAS PERHUBUNGAN	Pengguna Anggaran	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	2 Januari 2024	Menandatangani SPM UP/GU/TU/LS, bukti-bukti pembayaran dan dokumen pengesahan pertanggungjawaban pendapatan dan belanja program/kegiatan pada Dinas Perhubungan
16	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Pengguna Anggaran	KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	2 Januari 2024	Menandatangani SPM UP/GU/TU/LS, bukti-bukti pembayaran dan dokumen pengesahan pertanggungjawaban pendapatan dan belanja program/kegiatan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NO.	GPD	JABATAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN	JABATAN	TMT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
17	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	Pengguna Anggaran	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	2 Januari 2024	Menandatangani SPM UP/GU/TU/LS, bukti-bukti pembayaran dan dokumen pengesahan pertanggungjawaban pendapatan dan belanja program/kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran
18	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH	Pengguna Anggaran Kuasa Pengguna Anggaran	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2 Januari 2024 2 Januari 2024	Menandatangani SPM UP/GU, bukti-bukti pembayaran dan dokumen pengesahan pertanggungjawaban pendapatan dan belanja program/kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Menandatangani SPM TU/LS dan bukti-bukti pembayaran pada 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota 2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Menandatangani SPM LS/TU dan bukti pembayaran pada : I Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota Kegiatan : 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah 5. Pengadaan Barang Milik Daerah 6. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah 9. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah II Program Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan : 1. Analisa Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok Bunga 2. Analisa Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 3. Pengelolaan dana Darurat dan Mendesak 4. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota
19	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Pengguna Anggaran	KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	2 Januari 2024	Menandatangani SPM UP/GU/TU/LS, bukti-bukti pembayaran dan dokumen pengesahan pertanggungjawaban pendapatan dan belanja program/kegiatan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
20	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Pengguna Anggaran	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2 Januari 2024	Menandatangani SPM UP/GU/TU/LS, bukti-bukti pembayaran dan dokumen pengesahan pertanggungjawaban pendapatan dan belanja program/kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
21	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pengguna Anggaran	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2 Januari 2024	Menandatangani SPM UP/GU/TU/LS, bukti-bukti pembayaran dan dokumen pengesahan pertanggungjawaban pendapatan dan belanja program/kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
22	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Pengguna Anggaran	KEPALA BADAN PERANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2 Januari 2024	Menandatangani SPM UP/GU/TU/LS, bukti-bukti pembayaran dan dokumen pengesahan pertanggungjawaban pendapatan dan belanja program/kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO.	OPD	JABATAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN	JABATAN	TMT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
23	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Pengguna Anggaran	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2 Januari 2024	Menandatangani SPM UP/GU/TU/LS, bukti-bukti pembayaran dan dokumen pengesahan pertanggungjawaban pendapatan dan belanja program/kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika
24	KECAMATAN BARANGIN	Pengguna Anggaran	CAMAT BARANGIN	2 Januari 2024	Menandatangani SPM UP/GU, bukti-bukti pembayaran dan dokumen pengesahan pertanggungjawaban pendapatan dan belanja program/kegiatan pada Kecamatan Barangin Menandatangani SPM LS/TU dan bukti pembayaran pada program : 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Kuasa Pengguna Anggaran	Lurah Durian I	2 Januari 2024	Menandatangani SPM TU/LS dan bukti-bukti pembayaran Kelurahan Durian I pada : I Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan pelayanan Publik Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan Lain yang Dimpahkan II Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Kelurahan Kegiatan: 1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 2. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
		Kuasa Pengguna Anggaran	Lurah Durian II	2 Januari 2024	Menandatangani SPM TU/LS dan bukti-bukti pembayaran Kelurahan Durian II pada : I Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan pelayanan Publik Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan Lain yang Dimpahkan II Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Kelurahan Kegiatan: 1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 2. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
		Kuasa Pengguna Anggaran	Lurah Lubang Panjang	2 Januari 2024	Menandatangani SPM TU/LS dan bukti-bukti pembayaran Kelurahan Lubang Panjang pada : I Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan pelayanan Publik Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan Lain yang Dimpahkan II Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Kelurahan Kegiatan: 1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 2. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
		Kuasa Pengguna Anggaran	Lurah Siringan	2 Januari 2024	Menandatangani SPM TU/LS dan bukti-bukti pembayaran Kelurahan Siringan pada : I Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan pelayanan Publik Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan Lain yang Dimpahkan

NO.	OPD	JABATAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN	JABATAN	TMT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
					II. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Kelurahan Kegiatan: 1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 2. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
25	KECAMATAN LEMBAH SEGAR	Pengguna Anggaran	CAMAT LEMBAH SEGAR	2 Januari 2024	Menandatangani SPM UP/GU, bukti-bukti pembayaran dan dokumen pengesahan pertanggungjawaban pendapatan dan belanja program/kegiatan pada Kecamatan Barangin Menandatangani SPM LS/TU dan bukti pembayaran pada program : 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 6. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
		Kuasa Pengguna Anggaran	Lurah Aur Mulyo	2 Januari 2024	Menandatangani SPM TU/LS dan bukti-bukti pembayaran Kelurahan Aur Mulyo pada : I Program Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang Dilimpahkan Kepada Camat Kegiatan : Pelaksanaan urusan pemerintah yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan kelurahan Aur Mulyo II Program Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kegiatan : 1. Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan 2. Pemberdayaan masyarakat di kelurahan
		Kuasa Pengguna Anggaran	Lurah Kubang Sirakuk Utara	2 Januari 2024	Menandatangani SPM TU/LS dan bukti-bukti pembayaran Kelurahan Kubang Sirakuk Utara pada : I Program Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang Dilimpahkan Kepada Camat Kegiatan : Pelaksanaan urusan pemerintah yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan kelurahan Kubang Sirakuk Utara II Program Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kegiatan : 1. Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan 2. Pemberdayaan masyarakat di kelurahan
		Kuasa Pengguna Anggaran	Lurah Kubang Sirakuk Selatan	2 Januari 2024	Menandatangani SPM TU/LS dan bukti-bukti pembayaran Kelurahan Kubang Sirakuk Selatan pada : I Program Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang Dilimpahkan Kepada Camat Kegiatan : Pelaksanaan urusan pemerintah yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan kelurahan Kubang Sirakuk Selatan II Program Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kegiatan : 1. Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan 2. Pemberdayaan masyarakat di kelurahan
		Kuasa Pengguna Anggaran	Lurah Air Dingin	2 Januari 2024	Menandatangani SPM TU/LS dan bukti-bukti pembayaran Kelurahan Air Dingin pada : I Program Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang Dilimpahkan Kepada Camat

NO.	OPD	JABATAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN	JABATAN	TMT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
		Kuasas Pengguna Anggaran	Lurah Pasar	2 Januari 2024	<p>Kegiatan : Pelaksanaan urusan pemerintah yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan kelurahan Air Dingin</p> <p>ii Program Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kegiatan : 1. Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan 2. Pemberdayaan masyarakat di kelurahan</p> <p>Menandatangani SPM TU/LS dan bukti-bukti pembayaran Kelurahan Pasar pada :</p> <p>i Program Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang Dilimpahkan Kepada Camat Kegiatan : Pelaksanaan urusan pemerintah yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan kelurahan Pasar</p> <p>ii Program Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kegiatan : 1. Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan 2. Pemberdayaan masyarakat di kelurahan</p>
		Kuasas Pengguna Anggaran	Lurah Tanah Lembang	2 Januari 2024	<p>Menandatangani SPM TU/LS dan bukti-bukti pembayaran Kelurahan Tanah Lembang pada :</p> <p>i Program Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang Dilimpahkan Kepada Camat Kegiatan : Pelaksanaan urusan pemerintah yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan kelurahan Tanah Lembang</p> <p>ii Program Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kegiatan : 1. Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan 2. Pemberdayaan masyarakat di kelurahan</p>
26	KECAMATAN SILUNGKANG	Pengguna Anggaran	CAMAT SILUNGKANG	2 Januari 2024	Menandatangani SPM UP/OU/TU/LS, bukti-bukti pembayaran dan dokumen pengesahan pertanggungjawaban pendapatan dan belanja program/kegiatan pada Kecamatan Silungkang
27	KECAMATAN TALAWI	Pengguna Anggaran	CAMAT TALAWI	2 Januari 2024	Menandatangani SPM UP/OU/TU/LS, bukti-bukti pembayaran dan dokumen pengesahan pertanggungjawaban pendapatan dan belanja program/kegiatan pada Kecamatan Talawi

H. WALI EKOTA SAWAHLUNTO,

mi

ZEPRIHAN

04 DEC 2023
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

INDRA MULYONO, SH, MH
NIP. 19820411 201001 1 014

2